

KIPRAH POLITIK K.H. A. WARSON MUNAWWIR DI YOGYAKARTA

TAHUN 1973-2009 M.



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum.)**

Oleh:
Mimin Ayu Trisnawati
NIM: 15120060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mimin Ayu Trisnawati
NIM : 15120060
Jenjang/Jurusan : SI/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
5D2BFAHF017522598

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mimin Ayu Trisnawati

NIM: 15120060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**KIPRAH POLITIK K.H. A. WARSON MUNAWWIR DI
YOGYAKARTA TAHUN 1973-2009 M.**

yang ditulis oleh:

Nama : Mimin Ayu Trisnawati
NIM : 15120060
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

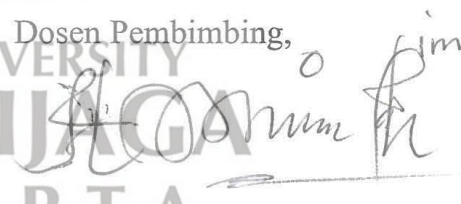
saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

Wassalâmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Oktober 2019

Dosen Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
NIP: 19710430 199703 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1716/Un.02/DA/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan judul : KIPRAH POLITIK K.H. A. WARSON MUNAWWIR DI YOGYAKARTA
TAHUN 1973-2009 M.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIMIN AYU TRISNAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 15120060
Telah diujikan pada : Senin, 04 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 19710430 199703 2 002

Penguji I

Penguji II

Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 19701008 199803 2 001

Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19680212 200003 1 001

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 November 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Dehan



H. Akhmad Patah, M.Ag.
NIP. 19610727 198803 1 002

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja
keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau
berharap.

Q.S. Al-Insyirah ayat 6-8.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk:

**Almamaterku Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga,
Seluruh keluarga, Ayah, Ibu, Adek-adekku,
Dan juga para pembaca karya ini.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
KIPRAH POLITIK K.H. A. WARSON MUNAWWIR DI YOGYAKARTA
TAHUN 1973-2009 M.

Pada masa Orde Baru (Orba), banyak kebijakan pemerintah yang dianggap meminggirkan politik Islam. Pemerintah melarang kembalinya Masyumi sebagai partai politik. Selain itu, rezim Orba juga melakukan penyederhanaan partai-partai politik Islam dengan sistem fusi partai yang terdiri dari Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti) menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tahun 1973. Agar dapat menyuarakan aspirasi umat Islam, salah satu cara yang harus ditempuh oleh kiai adalah dengan terlibat aktif dalam politik praktis. Hal tersebut juga dilakukan oleh K.H. A. Warson Munawwir dalam menjawab problematika yang diakibatkan oleh aktifitas politik di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini adalah kiprah politik K.H. A. Warson Munawwir, hal-hal yang melatarbelakangi kiprah dan kontribusinya dalam perpolitikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi ini menggunakan pendekatan biografi dan politik. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan analisa terhadap kiprah politik K.H. A. Warson Munawwir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *behavioral* Robert F. Bekhofer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode historis. Metode historis terdiri dari pengumpulan data, verifikasi sumber, penafsiran dan penulisan sejarah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kiprah politik K.H. Warson pada tahun 1973-2009, memberikan cukup kontribusi bagi perpolitikan yang ia geluti. Ketika menjabat menjadi anggota DPRD DIY periode 1977-1982, K.H. Warson memberikan nuansa Islami di pemerintahan Provinsi Yogyakarta, seperti membiasakan mengucapkan salam, penggunaan kalimat tahmid dan shalawat dalam berpidato. Saat menjadi Ketua Dewan Syura PKB, K.H. Warson selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bahkan ia mampu menjembatani apabila ada perbedaan pendapat dalam partai tanpa mengecewakan salah satu pihak. K.H. Warson sering mengadakan pengajian dan diskusi bersama anggota partai ke beberapa kiai. Hal ini dilakukan untuk selalu mengingatkan anggota PKB bahwa politik merupakan media untuk berjuang bukan untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan semata. K.H. Warson berperan besar dalam menghantar berdiri dan tegaknya PKNU. Sebagai Ketua Dewan Syura PKNU, K.H. Warson berusaha agar visi dan misi pendirian PKNU benar-benar direalisasikan. Jalannya PKNU harus berdasarkan bimbingan dan arahan para kiai yang telah diakui integritas moral dan keilmuannya. Terakomodasinya aspirasi para ulama dalam pengambilan keputusan partai menjadi tujuan yang ingin ia capai.

Kata Kunci: K.H. A. Warson, Kiprah, Politik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN¹

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Sh	es dan ha
ض	Dlad	DI	de dan el
ط	Tha	Th	te dan ha
ظ	Dha	Dh	de dan ha
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

¹Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
لا	Lam alif	La	el dan a
ء	Hamzah	`	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dlammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a da i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

حسِين : husain

حول : haula

3. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
سا	fathah dan alif	Ā	a dengan caping di atas
سي	kasrah dan ya	Ī	i dengan caping di atas
سو	dammah dan wau	Ū	u dengan caping di atas

4. Ta Marbutah

- Ta Marbutah* yang dipakai di sini dimatikan atau diberi *harakat sukun*, dan transliterasinya adalah /h/.
- Kalau kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang bersandang /al/, maka kedua kata itu dipisah dan *ta marbutah* ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

فاطمة : Fâtimah

مكة المكرمة : Makkah al -Mukarramah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَزَّلَ : nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang “ال” dilambangkan dengan “al”, baik yang diikuti dengan huruf syamsiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah.

Contoh:

الشمس : al-Syamsy

الحكمة : al-Hikmah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam. Atas kasih dan sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kiprah Politik K.H. A. Warson Munawwir di Yogyakarta Tahun 1973-2009”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pembawa rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad Saw. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada Siti Maimunah S. Ag., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih senantiasa mendorong, mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk terus menulis dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih untuk setiap kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak ada yang bisa penulis berikan kecuali doa semoga segala kebbaikannya dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih baik di sisiNya.

Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam serta kepada Dra. Soraya Adnani, M.Si. selaku Dosen

Penasihat Akademik di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu dan mendampingi penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga. Seluruh Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam serta segenap Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.

Terima Kasih dan syukur yang tiada terkira penulis sampaikan dengan tulus kepada kedua orang tua penulis, ayah dan ibuk, terima kasih untuk setiap doa baik yang dilangitkan. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan memperjuangkan banyak hal untuk penulis. Untuk ibuk, terima kasih telah melahirkan dan mengorbankan banyak hal untuk penulis, *you are the stronger woman that I ever seen*. Terima kasih juga kepada adik penulis Ahmad Burhanuddin Trisnawan dan Fahrizal Abdul Majid Trisnawan.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q terkhusus kepada Nyai Hj. Khusnul Khatimah yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Nyai Hj. Ida Fatimah, H. Iskandar, Drs. H. M. Nasikh Ridwan, K.H. Muslih Ilyas, Thaha Abdurrahman, Drs. Amrullah yang telah meluangkan waktu berharganya untuk memberikan informasi penting terkait penelitian penulis.

Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan SKI 2015 Latifah, Hanan, Lilis, Nilna, Elok, Dini, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk setiap temu dan waktu. Kebersamaan dan waktu yang telah kita lewati selama ini menjadi energi

tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kepada teman-teman di Pesantren Nurul Ummah Putri khususnya teman-teman High Second Floor Mbak Nita, Mbak Syifa, Mbak Hela, Mbak Nova, Elsa, Ami, Uyun, Susi, Oliv, teman-teman kamar Aisyah 9, Kak Susi, Kak Mita, Mbak Tsalis, Zulfa, Marwa, Maelan, Desi, Fifi, Yuli, Indana, Tsani, Sara. Kepada Adek-adekku dek Aza, dek Ani, dek Azma, dek Novi, dek Nisa. Terima kasih sudah menemani hari-hari penulis, menjadi tempat berbagi setiap keluh kesah penulis. Kehadiran kalian adalah sesuatu yang selalu penulis syukuri.

Kiranya lembaran ini tidak akan cukup untuk mengucapkan terima kasih penulis kepada semua pihak. Atas support dari berbagai pihak itulah, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 September 2019

Mimin Ayu Trisnawati
NIM. 15120060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Landasan Teori	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: PROFIL K.H. A. WARSON MUNAWWIR.....	22
A. Latar Belakang Keluarga K.H. Warson Munawwir.....	22
B. Latar Belakang Pendidikan K.H. A. Warson Munawwir.....	26
C. K.H. A. Warson Sebagai Kiai Pesantren.....	31
D. K.H. Warson dalam Organisasi Kemasyarakatan.	39
1. Nahdlatul Ulama (NU)	39
2. Generasi Muda Islam (Gemuis).....	42
BAB III: LATAR BELAKANG K.H. WARSON TERJUN KE POLITIK PRAKTIS.....	44
A. Kondisi Politik di Yogyakarta Akhir Orde Lama.....	44
B. Kebijakan Fusi Partai oleh Pemerintah Orde Baru.....	49

C. Reformasi Pasca Jatuhnya Orde Baru.....	56
BAB IV: KONTRIBUSI K.H. A. WARSON MUNAWWIR DALAM POLITIK PRAKTIS 1973-2009.....	63
A. Anggota DPRD DIY Periode 1977-1982 Fraksi PPP	63
B. Ketua Dewan Syura PKB 1999-2006.....	65
C. Ketua Dewan Syura PKNU 2006-2009.....	73
BAB V: PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	85



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sosial dan politik di negara Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Islam telah membantu memelihara, mempertahankan dan bahkan menyimbolisasikan identitas dan ciri khas rakyat Indonesia serta oposisinya terhadap kekuasaan kolonial Belanda.¹ Di bawah komando Islam muncul inspirasi untuk berjuang menuntut kemerdekaan dari pemerintah asing (penjajah) sehingga terjadi beberapa perang, di antaranya Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Aceh (1871-1908). Pada abad ke-20, Islam menjadi sebab bangkitnya solidaritas nasional Indonesia yang dimulai dengan didirikannya Sarekat Islam.² Aktivitas perjuangan Islam makin tampak ketika menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terutama pada masa pendudukan Jepang. Melihat sumbangannya yang begitu besar pada setiap perjalanan sejarah politik dari masa ke masa, umat Islam Indonesia selalu berharap bahwa perubahan politik yang ada akan diikuti perubahan positif posisi mereka dalam pemerintahan.

Selama periode Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno semakin cenderung memimpin dengan otoriter. Di antara tindakan Presiden Soekarno

¹Muhammad Shokheh, *Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi: Relasi Islam-Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998* (Semarang: Unnes Press, 2008), hlm. 1.

²M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), hlm. 41.

yang merugikan Islam Politik adalah melarang Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tahun 1960 dan memenjarakan para pemimpin Masyumi yang dianggap sebagai oposisi Soekarno. Di lain pihak Soekarno terlalu banyak memberikan kesempatan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk berkembang dan mengumumkan kebijakan tentang Nasionalis-Agama Komunis (Nasakom). Hal ini tentunya menjadi pemicu ketegangan kalangan Islam dengan kaum Komunis yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis.³

Pada awal pemerintahan Orde Baru, di kalangan aktivis Islam timbul optimisme untuk kembali memainkan peranan dominan dalam politik nasional, mengingat sumbangan mereka dalam meruntuhkan rezim Orde Lama. Kerja sama antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), organisasi mahasiswa dan kelompok Islam dalam menjatuhkan PKI dan Bung Karno setelah terjadinya G30S/PKI memberikan indikasi bahwa Islam mendapatkan legitimasi dalam peran politiknya.⁴ Namun optimisme itu buyar setelah pemerintah Orba melarang dihidupkannya kembali Masyumi. Pada akhir tahun 1960, Soekarno membubarkan Masyumi dengan tuduhan bahwa tokoh-tokoh Masyumi dicurigai terlibat dalam gerakan Perjuangan Rakyat

³Shokheh, *Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi*, hlm. 2.

⁴Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 25.

Semesta (Permesta).⁵ Kemudian pada era Soeharto, sebagian eks elite Masyumi ingin merehabilitasi partai. Namun keinginan tersebut ditolak oleh rezim yang berkuasa.⁶

Kebijakan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengakui pentingnya nilai-nilai keagamaan dan moral, namun ada pembatasan-pembatasan tertentu yang mengarahkan pemikiran-pemikiran keagamaan sehingga tidak memunculkan terbentuknya politik keagamaan. Kebijakan pembangunan yang digariskan oleh Orde Baru menunjukkan sikap ambivalen rezim ini dalam menempatkan agama dan politik.⁷ Ketakutan pemerintah terhadap bahaya yang mungkin mengganggu tatanan sosial-politik, seperti ketakutan terhadap partai politik Islam memaksa pemerintah Soeharto menjadi keras dan represif terhadap gerakan politik apapun yang dilatarbelakangi oleh gagasan-gagasan keagamaan. Ketakutan ini muncul karena upaya-upaya untuk menerapkan ideologi Islam di negara Indonesia telah dilakukan baik oleh gerakan sparatis seperti Darul Islam maupun oleh

⁵ Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) merupakan sebuah gerakan militer di Indonesia yang dideklarasikan oleh Letkol Sumual pada 2 Maret 1957. Latar belakang munculnya gerakan ini adalah ditiutkannya Divisi Banteng sehingga hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini kemudian diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Hal ini menimbulkan kekecewaan para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan adanya ketidakpuasan dari beberapa daerah di wilayah Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957, Letkol Sumual menyatakan seluruh wilayah Teritorium VII dalam keadaan darurat perang serta berlakunya pemerintahan militer sesuai pasal 129 UUD Sementara dan PP No. 33 tahun 1948 RI. Lihat R. Z. Lerissa, *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 69-85.

⁶Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 56.

⁷Shokheh, *Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi*, hlm. 6.

para pemimpin politik Islam.⁸ Situasi politik masa itu tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sosial-politik umat Islam. Kebijakan pemerintah yang terkesan meminggirkan Islam telah mendorong para kiai untuk melakukan perubahan. Banyak kiai yang memilih untuk terjun dalam politik praktis agar dapat menyuarakan aspirasi umat Islam dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kiai menurut Hiroko Horikoshi merupakan pemimpin karismatik dalam bidang agama. Ia fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran-pikiran pengikutnya.⁹ Kiai berperan kreatif dalam perubahan sosial. Hal ini dikarenakan kiai adalah pelopor perubahan sosial dengan caranya sendiri. Kiai tidak melakukan penyaringan informasi melainkan menawarkan agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya.¹⁰

Melihat situasi politik pada masa pemerintahan Orba tersebut, pada tahun 1973 K.H. A. Warson Munawwir¹¹ untuk pertama kalinya terjun dalam politik praktis dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). K.H. Warson merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir

⁸Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 162.

⁹Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 1.

¹⁰Abdurrahman Wahid, "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial? Sebuah Pengantar" dalam Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. xvii.

¹¹Untuk selanjutnya K.H. A. Warson Munawwir akan ditulis K.H. Warson.

Komplek Q¹² di Krapyak Yogyakarta. Kiai yang merakyat dalam ingatan santrinya ini merupakan putra dari istri kedua K.H. M. Munawwir yang lahir pada 30 November 1934, yaitu 24 tahun setelah Pondok Pesantren Krapyak didirikan. K.H. Warson tinggal di rumah ibunya Nyai Hj. Sukis di Krapyak bersama dengan kedua kakaknya yaitu K.H. Zainal dan Nyai Jamalah. Setelah wafatnya K.H. Munawwir, K.H. Warson tumbuh di bawah didikan kakak iparnya yaitu Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum banyak mempengaruhi kepribadian dan pemikiran K.H. Warson. Pada tahun 1989, K.H. Warson mulai merintis Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q di atas tanah yang diwakafkan oleh Kiai Ali Maksum.¹³

K.H. Warson Munawwir sebagai pengasuh pondok pesantren dan juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), telah aktif dalam organisasi masyarakat sejak muda. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan K.H. Warson dalam organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) sebelum tahun 1960-an. Tidak banyak informasi terkait keaktifan K.H. Warson dalam organisasi IPNU ini. Pada perkembangan selanjutnya, K.H. Warson juga ikut aktif dalam organisasi kepemudaan NU yaitu Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor). Di awal pembentukan GP Anshor di Yogyakarta tahun 1958, K.H. Warson berhasil terpilih menjadi Ketua Umum GP Anshor wilayah Yogyakarta dengan

¹²Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q merupakan pondok pesantren khusus putri bagi pelajar dan mahasiswa. Komplek Q didirikan pada tanggal 22 September 1989 oleh K.H. A. Warson Munawwir sebagai salah satu bagian dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

¹³Khalimatu Nisa dan Fahma Amirotulhaq, *Jejak Sang Pionir Kamus Al-Munawwir K.H. A. Warson Munawwir*, cetakan ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Komplek Q, 2015), hlm. 21-23.

sekretaris dijabat oleh H. Iskandar. Selama menjabat menjadi ketua GP Ansor, K.H. Warson banyak membangun hubungan baik dengan ormas Islam lain di luar NU, salah satunya adalah Muhammadiyah.¹⁴ Sebagai kader NU yang berbakat, K.H. Warson dipercaya untuk menjadi pemimpin redaksi harian *Duta Masyarakat*.¹⁵ Pada tahun 1965, kepemimpinan K.H. Warson semakin diperhitungkan dengan terpilihnya K.H. Warson menjadi ketua aliansi Generasi Muda Islam (Gemuis) dengan sekretaris dijabat oleh Zuhairi sebagai perwakilan dari Muhammadiyah.¹⁶

K.H. Warson mulai terjun dalam politik praktis dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). K.H. Warson berhasil memperoleh jabatan sebagai anggota DPRD DIY periode 1977-1982, di pemilihan umum tahun 1977. Pada awal pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Yogyakarta tahun 1999, K.H. Warson merupakan salah satu kiai yang banyak berperan dalam pendirian PKB, untuk meyakinkan massa di daerah kepada PKB, K.H. Warson bergerak langsung ke berbagai kecamatan. Setelah PKB terbentuk K.H. Warson terpilih untuk memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Syura. Sebagai Ketua Dewan Syura, K.H. Warson

¹⁴ Wawancara dengan H. Iskandar rekan organisasi K.H. Warson di Graha Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) pada tanggal 16 Februari 2019.

¹⁵ *Duta Masyarakat* merupakan koran milik Partai Nahdlatul Ulama. Koran ini digagas oleh K.H. Ahmad Wahid Hasyim setelah NU keluar dari Masyumi. Pada awalnya *Duta Masyarakat* diterbitkan untuk kepentingan menyebarkan gagasan dan aspirasi partai menjelang Pemilu 1955. *Duta Masyarakat* diluncurkan pertama kali tanggal 2 Januari 1954. Lihat Hairus Salim, *Duta Masyarakat* dalam <http://www.nu.or.id/post/read/39996/duta-masyarakat> diakses pada 3 April 2019 pukul 14.15 WIB.

¹⁶ Gemuis adalah organisasi federasi pemuda, pelajar, dan mahasiswa Islam yang didirikan atas inisiatif GP Ansor dan PMII untuk menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan pemuda Islam.

memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan dan penetapan langkah-langkah politik dan kebijakan yang diambil oleh PKB.¹⁷

Adanya perbedaan visi dan pandangan antara Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan para kiai sepuh menjadikan PKB mengalami perpecahan. Pada tahun 2006 atas kesepakatan kiai yang tergabung dalam tim 17¹⁸ dibentuklah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). K.H. Warson merupakan salah satu kiai yang memprakarsai berdirinya PKNU. Hal ini dapat dilihat dari masuknya K.H. Warson dalam tim 17 yang memiliki banyak peran dalam pendirian partai ini. Rumah K.H. Warson di Krapyak, sering digunakan sebagai tempat pertemuan para kiai untuk membahas pendirian partai ini. Bahkan dengan gaya diplomasinya yang lembut, K.H. Warson berhasil meyakinkan massa bahwa NU harus mampu memegang kendali agar dapat menegakkan Islam *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jamâ'ah*.¹⁹ Setelah PKNU terbentuk K.H. Warson kemudian terpilih sebagai Ketua Dewan Syura PKNU.

Kiai pesantren yang terlibat dalam politik praktis masa pemerintahan Orde Baru memiliki tujuan dan alasan tersendiri. Mereka melakukan afiliasi politik yang berbeda antara kiai satu dan lainnya. Penelitian tentang kiprah politik K.H. Warson tahun 1973-2009 sebagai kiai pesantren yang terlibat dalam politik praktis menjadi penting untuk dikaji. Penelitian yang ada

¹⁷Khalimatu Nisa dan Fahma Amirotulhaq, *Jejak Sang Pionir Kamus Al-Munawwir*, hlm. 68.

¹⁸Penjelasan terkait tim 17 ini akan dijelaskan pada Bab IV.

¹⁹Wawancara dengan Nasih Ridwan di kantor Adzikra Tour and Travel, Kotabaru pada 11 Februari 2019.

sebelumnya, lebih banyak menyoroti K.H. Warson sebagai kiai pesantren yang memiliki banyak peran bagi pendidikan di Pesantren Al-Munawwir sehingga perlu dilakukan penelitian terkait kiprah politik K.H. Warson Munawwir melihat kiprahnya dalam politik merupakan hal yang patut untuk diketahui masyarakat luas. Sejak tahun 1973-2009 K.H. Warson melakukan afiliasi yang berbeda terhadap tiga partai politik yaitu PPP, PKB dan PKNU. Hal ini menarik untuk diteliti secara mendalam mengingat K.H. Warson merupakan tokoh yang berpengaruh dalam perpolitikan di Yogyakarta. Faktor yang menjadi latar belakang kiprah politik dan kontribusi K.H. Warson bagi dunia politik yang digelutinya menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Selain itu, keterkaitan antara kiai dan politik senantiasa menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Banyak perdebatan tentang keterlibatan kiai dalam politik. Sebagian berpendapat bahwa kiai seharusnya berperan sebagai pengayom umat dalam kehidupan beragama dan lebih tepat jika menghindarkan diri kegiatan politik. Sebaliknya, terdapat pendapat bahwa kiai perlu terlibat dalam politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama sendiri.²⁰ Melihat itu, penting dilakukan penelitian tentang keterlibatan kiai dalam politik praktis. Motif-motif yang mendasari keterlibatan seorang kiai dalam politik praktis. Oleh karena itu, keterlibatan K.H. Warson Munawwir dalam politik praktis menjadi penting untuk dikaji.

²⁰Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*, cetakan ke-2 (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 8.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah kiprah politik K.H. Warson. Kiprah politik diartikan sebagai semua bentuk partisipasi, baik gagasan dan tindakan K. H. Warson dalam politik praktis. Politik praktis yang dimaksud di sini adalah kiprah politik K.H. Warson dalam partai politik di Provinsi Yogyakarta. Perjalanan politik K.H. Warson sebagai anggota DPRD dari fraksi PPP ataupun sebagai Ketua Dewan Syura di PKB dan PKNU menjadi bukti nyata kiprah K.H. Warson dalam politik praktis. Batasan waktu yang dipilih penulis adalah tahun 1973-2009. Tahun 1973 merupakan awal keterlibatan K.H. Warson dalam politik praktis dengan masuk sebagai anggota PPP. Tahun 2009 dipilih sebagai akhir penelitian karena pada tahun tersebut K.H. Warson keluar dari PKNU dan tidak lagi aktif dalam perpolitikan.

Agar penelitian ini dapat terfokus maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana profil K.H. A. Warson Munawwir?
2. Mengapa K.H. A. Warson terjun ke politik praktis?
3. Apa kontribusi K.H. A. Warson Munawwir dalam politik praktis tahun 1973-2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk mengetahui capaian dari sebuah penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang kehidupan K.H. Warson sehingga dapat dijelaskan

hal-hal yang membentuk dan mempengaruhi kepribadian K.H. Warson, menganalisis latar belakang keterlibatan K.H. Warson dalam politik praktis serta menganalisis kontribusi K.H. Warson dalam politik praktis yang digelutinya sejak tahun 1973-2009.

Kegunaan penelitian sebagai pengetahuan terhadap manfaat sebuah penelitian setelah penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberi sumbangan keilmuan terhadap dunia akademik, khususnya tentang kiprah politik seorang kiai
2. Membantu peneliti selanjutnya untuk menggali informasi yang berkaitan dengan politik dan kiai.
3. Dapat dijadikan sebagai model untuk menganalisis keterlibatan kiai dalam perpolitikan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah pembahasan yang menekankan pada upaya memposisikan penelitian yang dilakukan dengan karya-karya terdahulu yang sejenis.²¹ Dengan melihat hasil penelitian terdahulu dapat membantu kelancaran jalannya suatu penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menghindari plagiasi, pengulangan jenis penelitian serta untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa tulisan atau karya ilmiah berhubungan dengan penelitian ini, namun belum ada yang secara

²¹Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 26.

khusus membahas tentang kiprah politik K.H. Warson Munawwir. Berikut adalah beberapa karya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Skripsi yang berjudul “K.H. A. Warson Munawwir dan Dunia Pesantren (Kiprahnya dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1947-2013)” karya Nur Rakhim, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2016. Skripsi tersebut menjelaskan tentang K.H. A. Warson Munawwir dan kontribusinya bagi pendidikan Pondok Pesantren Munawwir Krapyak. Terkait aktivitas politik K.H. Warson Munawwir sedikit disinggung dalam skripsi ini, yang mana aktivitas politik K.H. Warson Munawwir memberi pengaruh terhadap pemikiran politik santri Pondok Pesantren Munawwir. Aktivitas politik K.H. Warson dalam skripsi tersebut dijelaskan dalam satu sub bab tentang kontribusi dalam pendidikan politik yang merupakan bagian dari kontribusinya bagi pendidikan Pondok Pesantren Munawwir Krapyak. Perbedaan karya tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah kiprah politik K.H. Warson.

Jejak Sang Pionir Kamus Al-Munawwir K.H. A. Warson Munawwir, karya Khalimatu Nisa dan Fahma Amiratulhaq yang diterbitkan oleh Pustaka Komplek Q di Yogyakarta tahun 2015. Buku ini menguraikan tentang kehidupan K.H. Warson terutama perjuangannya dalam membuat kamus *Al-Munawwir* dan mendirikan Pondok Al-Munawwir Komplek Q. Uraian tentang politik K.H. Warson hanya dibahas beberapa halaman pada bab Kiprah

Organisasi K.H. Warson, yang membahas tentang keterlibatan K.H. Warson dalam partai politik tertentu (PPP, PKB, PKNU). Alasan yang berkaitan dengan keterlibatan K.H. Warson dan kontribusinya terhadap politik tidak dijelaskan dalam buku ini. Dalam buku ini belum dibahas secara mendetail terkait kiprah politik K.H. A. Warson Munawwir.

Skripsi yang berjudul “Peran Kyai terhadap Kesejahteraan Santri *Ndalem* Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta” karya Atik Dewi Siti Jenar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Kiai mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan santri *ndalem*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembebasan biaya sekolah, biaya hidup dan tempat tinggal bagi santri *ndalem*. Skripsi tersebut fokus pada peran K.H. Warson sebagai Pengasuh Pondok Al-Munawwir Komplek Q terhadap kesejahteraan santri *ndalem* yang mengabdikan diri padanya, sedangkan fokus penelitian ini adalah kiprah politik K.H. Warson di Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Transformasi Institusi Pesantren (Studi Kasus Model Kepengurusan PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta)” karya Fikri Niatin Chanifiyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga tahun 2017. Penulis skripsi ini membahas tentang perkembangan institusi di dalam Pondok Al-Munawwir Komplek Q. Pada awal berdirinya semua yang berkaitan dengan santri baik peraturan sehari-hari maupun pendidikan diatur oleh kepengurusan tunggal pondok. Pada perkembangannya, untuk mengatur secara penuh pendidikan santri dibentuklah kepengurusan

independent dalam naungan madrasah diniyah (madin). Perbedaan karya tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini fokus pada kiprah politik K.H. Warson.

Skripsi yang berjudul “Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (Studi Kasus Minimarket Q-Mart)” karya Eri Khoerunnisa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Skripsi ini meneliti tentang fungsi Q-Mart dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi di Pondok Al-Munawwir Komplek Q. Dalam skripsi ini dijelaskan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan Q-Mart ataupun yang menjadi penghambat perkembangan Q-Mart. Hasil penelitian menunjukkan Q-Mart sebagai salah satu unit usaha milik pondok terletak pada kondisi yang menguntungkan, artinya Q-Mart memiliki peluang dan kekuatan besar sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan potensi ekonomi Pondok Al-Munawwir Komplek Q. Perbedaan karya tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini fokus pada kiprah politik K.H. Warson.

Berdasarkan karya-karya yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan tulisan yang secara khusus membahas tentang kiprah politik K.H. Warson Munawwir. Beberapa karya yang ada lebih menonjolkan pada kontribusi pendidikan K.H. Warson di Pesantren Al-Munawwir Komplek Q sehingga perlu dilakukan penelitian terkait kiprah politik K.H. Warson Munawwir melihat kiprahnya dalam politik merupakan hal yang patut untuk

diketahui masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan bagi penelitian-penelitian sebelumnya tentang K.H. Warson Munawwir.

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah kerangka pemikiran yakni jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan dan menunjukkan masalah-masalah yang diidentifikasi. Kerangka teori ini berfungsi sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi.²² Perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang kiprah politik. Menurut WJS. Purwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* kiprah diartikan sebagai gerak kegiatan yang intensif dalam bidang tertentu.²³ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kiprah secara etimologi adalah kegiatan, sedangkan berkiprah adalah melakukan kegiatan atau berpartisipasi dengan semangat tinggi atau bergerak, berusaha di sebuah bidang.²⁴

Definisi politik pada umumnya menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan

²²Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 129.

²³WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), hlm. 599.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 442.

melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁵ George B de Huszar dan Thomas H.

Stevenson mendefinisikan politik sebagai berikut:

*Political science is the field of study concened primarily with the power relationships among men, between men and the state, and among state. It is involved, then with human control, regulation, and influence.*²⁶

Ilmu politik adalah studi yang memperhatikan hubungan kekuasaan antara orang dengan orang, antara orang dengan negara dan antara negara dengan negara. Ia menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan *human control*, pengaturan dan juga pengaruh.²⁷

Menurut Deliar Noer politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat definisi ini politik dapat diartikan sebagai perilaku atau tingkah laku manusia baik berupa kegiatan, aktivitas atau sikap yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.²⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan biografi dan politik. Pendekatan biografi digunakan untuk menjelaskan profil K. H. Warson Munawwir guna memahami kepribadiannya berdasarkan latar belakang lingkungan di mana K.H. Warson dibesarkan. Pendekatan biografi juga digunakan untuk memahami pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi

²⁵Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 39.

²⁶Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 18.

²⁷*Ibid.*, hlm. 18.

²⁸Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad RuzdiyantoPuluhuluwa, "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)", *Jurnal Mimbar: Sosial dan Pembangunan*, Volume XXI, No. 2, 2005, hlm. 265.

keputusan K.H. Warson untuk terlibat dalam politik praktis. Pendekatan politik digunakan untuk melihat renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat situasi politik tertentu yang nantinya diharapkan mampu menjelaskan kiprah politik K.H. Warson Munawwir.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Behavioral* oleh Robert F. Bekhofer. Menurut Bekhofer setiap manusia memberi jawaban terhadap situasi dengan menginterpretasi suatu situasi. Interpretasi situasional tersebut antara lain bagaimana cara bertindak, bagaimana memanfaatkan lingkungan fisik, bagaimana kegiatan kelompok diorganisir dan lain sebagainya. Teori ini mengkaji perilaku manusia yang timbul akibat reaksi manusia tersebut terhadap situasi yang telah diinterpretasikannya.²⁹ K.H. Warson terlibat dalam politik praktis disebabkan situasi politik yang meminggirkan umat Islam dalam politik. Untuk dapat memperjuangkan aspirasi umat Islam dan didorong oleh kesadaran untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, K.H. Warson mengambil langkah dengan bergabung dalam partai politik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sekaligus penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah

²⁹T. Ibrahim Alfian, *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 416.

seperangkat aturan atau prinsip-prinsip dasar yang sistematis dan digunakan dalam proses pengumpulan data, mengerti dan menafsirkannya serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah (historiografi).³⁰ Adapun tahap yang ditempuh dalam penelitian sejarah adalah:

1. Heuristik

Heuristik merupakan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data lisan, data tertulis dan artefak. Sumber lisan didapatkan dari orang-orang yang hidup sezaman dengan tokoh yang diteliti ataupun yang mendengar kisahnya secara turun-temurun. Sumber lisan tersebut dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara bebas dilakukan secara spontan tanpa disadari oleh narasumber.³¹ Dalam wawancara penulis menggunakan alat bantu berupa alat tulis, buku catatan, dan alat rekam untuk mempermudah penulis dalam mengolah data hasil wawancara. Beberapa narasumber yang diwawancarai penulis adalah keluarga K.H. Warson, teman sejawat, santri alumni Pesantren Munawwir Krapyak, dan rekan politik K.H. Warson.

Sumber tertulis yang didapat antara lain buku-buku cetak, skripsi dan arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber tersebut penulis

³⁰Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik* (Jakarta: Restu Agung, 2006) hlm. 35.

³¹Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 62.

dapat dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, koleksi pribadi keluarga K.H. Warson, buku-buku terkait K. H. Warson yang diterbitkan oleh Pustaka Komplek Q. Artefak yang penulis dapatkan adalah bangunan tempat tinggal K.H. Warson dan bangunan Pondok Al Munawwir Komplek Q yang didirikan K.H. Warson.

2. Verifikasi Sumber

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik yang dilakukan berupa kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian atau otentisitas sumber, sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji dan mengungkap keabsahan atau kebenaran suatu sumber.³² Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang otentik dan kredibel.

Sumber tertulis dikritik dengan cara membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber lainnya baik dari segi isi, bahasa maupun segi fisiknya. Kritik sumber tertulis dilakukan terhadap dokumen/ arsip seperti ijazah, piagam penghargaan dari Gubernur DIY, Kartu Tanda Anggota DPRD DIY, dan lain sebagainya diuji keasliannya dari segi fisik (kertas, tinta, bahasa). Sementara sumber lisan dikritik dengan cara membandingkan informasi yang disampaikan informan dan kondisi fisik informan, apakah informan tersebut saksi hidup yang pernah sezaman atau masih keturunan dari tokoh yang diteliti. Sumber lisan dapat diakui kredibilitasnya apabila memenuhi syarat bahwa sumber lisan disampaikan

³²Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 69.

oleh saksi berantai dan dilaporkan oleh orang terdekat.³³ Selain itu peneliti juga membandingkan informasi yang didapat dari dokumen, arsip atau buku dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber.

3. Interpretasi

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah penafsiran sumber yang telah diuji kebenarannya dan keasliannya. Interpretasi merupakan suatu usaha sejarawan dalam menafsirkan data sejarah yang ditemukan dengan tujuan melakukan sintesis atas sejumlah data yang diperoleh.³⁴ Menurut Kuntowijoyo interpretasi terdiri dari dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan.³⁵ Bukti sejarah tidak dapat berbicara sendiri, maka perlu penafsiran sejarawan untuk menguraikan bukti sejarah tersebut dan untuk menghubungkan antara bukti satu ke bukti yang lain. Agar dapat merekonstruksi tentang kiprah politik K.H. Warson akan dilakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan bantuan pendekatan biografi dan politik serta teori *behavioral* Robert F. Bekhofer.

4. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.³⁶ Langkah ini dilakukan

³³Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm. 108.

³⁴*Ibid.*, hlm. 17.

³⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 100-101.

³⁶Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm. 116.

dengan menuliskan data yang telah diverifikasi dan dianalisa menjadi kesimpulan akhir yang relevan sehingga data tersebut dapat ditulis dan dipaparkan sesuai dengan kerangka tulisan dalam bentuk penulisan sejarah. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis harus memberikan penjelasan yang deskriptif-analisis, sistematis dan kronologis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran alur pembahasan penelitian mulai dari ide awal hingga akhir. Agar penelitian terarah, maka dalam penelitian ini pembahasan disajikan dalam lima bab. Pembagian bab ini dimaksudkan agar isi dari tiap-tiap bab dapat teruraikan secara mendetail menjadi suatu paparan yang sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa permasalahan ini dibahas dan mengapa memilih objek penelitian tersebut, dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan menuju pembahasan pada bab berikutnya.

Bab kedua membahas profil K.H. Warson meliputi latar belakang keluarga dan pendidikan K.H. Warson yang memberikan gambaran tentang pribadi K. H. Warson. K.H. Warson sebagai kiai pesantren mendeskripsikan tentang posisinya dalam pesantren. Di samping itu, dibahas juga K.H. Warson

dalam organisasi sosial kemasyarakatan, berkaitan dengan mobilitas sosial K.H. Warson di luar pesantren.

Bab ketiga. Membahas latar belakang K.H. Warson terlibat dalam politik praktis. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang mempengaruhi K.H. Warson dalam berpolitik praktis, termasuk keputusan K.H. Warson dalam berafiliasi politik.

Bab keempat mendeskripsikan tentang kontribusi K.H. Warson dalam perpolitikan di Yogyakarta tahun 1973-2009. Pada bab ini dibahas terkait analisis penulis mengenai kiprah politik K.H. Warson Munawwir.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut berisi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang dilengkapi dengan saran peneliti bagi peneliti selanjutnya, sehingga dapat memperkaya kajian sejarah lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Umat Islam Indonesia selalu berharap bahwa perubahan politik yang ada akan diikuti perubahan positif posisi mereka dalam pemerintahan. Namun harapan tersebut tidak terjadi selama periode akhir Orde Lama dan Orde Baru. Periode tersebut dapat dikatakan sebagai kondisi yang tidak menguntungkan bagi politik Islam di Indonesia. Pada masa itu, terjadi penekanan aktifitas politik umat Islam dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah memiliki tujuan terhadap peminggiran politik umat Islam.

Ketika posisi umat Islam terancam dalam perpolitikan Indonesia itulah, K.H. Warson Munawwir memutuskan untuk terjun dalam politik praktis. K.H. Warson Munawwir lahir pada 30 November 1934 di Krapyak. Ia dilahirkan dari keluarga pesantren, ayahnya K.H. Muhammad Munawwir merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. Sejak muda K.H. Warson telah aktif dalam berorganisasi seperti dalam IPNU, GP-Ansor, Gemuis dan NU.

Keterlibatan K.H. Warson dalam politik praktis bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, karena ia telah matang dan berpengalaman melalui organisasi yang telah digelutinya sejak muda. Dengan tujuan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan menegakkan Islam *Ahlu as-Sunnah Wa al-Jamâ'ah*

K.H. Warson memutuskan untuk terjun dalam politik praktis. Terpilihnya K.H. Warson Munawwir sebagai anggota DPRD DIY dari fraksi PPP periode 1977-1982 memberikan kesempatan baginya untuk melakukan dakwah di pemerintahan tingkat daerah di DIY. K.H. Warson memberikan nuansa keislaman dalam pemerintahan dengan membiasakan menggunakan salam dalam berbicara dan memformalkan penggunaan kalimat tahmid, kalimat shalawat dalam berpidato. K.H. Warson juga memberikan perhatian besar terhadap urusan keagamaan umat Islam. K.H. Warson selalu memastikan kegiatan yang menyangkut peribadatan umat Islam tidak mendapat hambatan dari segi apapun.

K.H. Warson memiliki peran besar bagi berdirinya PKB di DIY. Ia selalu memberikan masukan terkait pendirian partai hingga meyakinkan massa di daerah terhadap PKB. Sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, K.H. Warson selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan partai, bahkan ia mampu menjembatani apabila ada perbedaan pendapat dalam partai tanpa mengecewakan salah satu pihak. K.H. Warson sering mengadakan pengajian dan diskusi bersama anggota partai ke beberapa kiai untuk mengingatkan anggota PKB bahwa politik merupakan media untuk berjuang bukan untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan semata. K.H. Warson merupakan tokoh kunci bagi perolehan suara PKB di Yogyakarta. Ia ikut berkeliling untuk meyakinkan massa terutama warga NU untuk memilih PKB agar mampu memegang kendali untuk menegakkan Islam *Ahlu As-Sunnah Wa Al-Jamâ'ah*.

K.H. Warson merupakan salah satu tokoh deklarator bagi berdirinya PKNU. Sebagai Ketua Dewan Syura PKNU K.H. Warson selalu berusaha agar visi dan misi pendirian partai benar-benar direalisasikan. Tegaknya Islam *Ahlu As-Sunnah Wa Al-Jamâ'ah* sebagai asas partai dan artikulasi politik ulama adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh K.H. Warson.

B. Saran

Perjuangan untuk berdakwah melalui jalan politik adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Usaha para kiai yang terjun dalam politik praktis untuk memperjuangkan Islam memang patut untuk dilakukan. Melalui kekuasaanlah Islam mampu didakwahkan dalam birokrasi pemerintahan. Hendaknya kekuasaan yang sudah diraih, benar-benar digunakan untuk jalan perjuangan umat, bukan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.

Usaha pengkajian terhadap kiprah politik K.H. Warson dalam penelitian ini masih sangat terbatas sehingga kemungkinan ditemukannya sumber dan keterangan sejarah yang mampu melengkapinya. Untuk itu, penulis berharap akan ada pengkajian lebih lanjut yang dilakukan. K.H. Warson adalah kiai pesantren yang terjun dalam politik praktis. Oleh karena itu, diharapkan agar dokumen dan arsip yang berhubungan dengan aktivitas politik K.H. Warson dapat disempurnakan untuk mempermudah pengkajian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- _____. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak. 2011.
- Alfian, T. Ibrahim. *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. 1992.
- Al-Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- As'ad, Ali. K.H. M. *Munawwir Pendiri Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta*. Yogyakarta: Pondok Al-Munawwir Krpyak. 2011.
- Athailah, Ahmad. K.H. *Ali Maksum: Ulama, Pesantren, dan NU*. Yogyakarta: LKiS. 2019.
- Aziz, Abdul. *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Ebyhara, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1966*. Yogyakarta: LKiS. 2011.
- Fealy, Greg dan Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama dan Negara*. Yogyakarta: LKiS. 2010.
- Feillard, Andree. *NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS. 2009.
- Gani, Soelistyati Ismail. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987.

- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. Jakarta: P3M. 1987.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS. 1995.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1999.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1995.
- _____. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan. 1997.
- Lerissa, R. Z.. *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997.
- MS, Basri. *Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik*. Jakarta: Restu Agung. 2006.
- Nisa, Khalimatu dan Fahma Amiratulhaq. *Jejak Sang Pionir Kamus Al-Munawwir K.H. A. Warson Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Komplek Q. 2015.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Purwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2011.
- Shokheh, Muhammad. *Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi: Relasi Islam-Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998*. Semarang: Unnes Press. 2008.
- Suprayogo, Imam. *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Malang Press. 2009.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Turmuzi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS. 2004.

Zada, Khamzani dan A. Fawaid Sjadzili. *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2010.

B. SKRIPSI

Arif Permata Putra. “Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia Tahun 1960”. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, tidak diterbitkan. 2009.

Chanifiyah, Fikri Niatin. “Transformasi Institusi Pesantren (Studi Kasus Model Kepengurusan PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta)”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2017.

Fuad, A.. “Fusi Partai-Partai Islam Menjadi PPP Pada Masa Awal Orde Baru (1971-1973)”. Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2015.

Jenar, Atik Dewi Siti. “Peran Kyai Terhadap Kesejahteraan Santri Ndalem Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2017.

Khoerunnisa, Eri. “Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta (Studi Kasus Minimarket Q-Mart)”. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2019.

Nuruddin. “Konversi Kiai Nahdlatul Ulama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) (Studi Kasus di Dusun Mlangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamoing, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam, tidak diterbitkan. 2009.

Rakhim, Nur. “K.H. A. Warson Munawwir dan Dunia Pesantren (Kiprahnya dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1947-2013)”. Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2016.

C. TESIS

Arifin, Ichwan. “Kiai dan Politik Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Muktamar II di Semarang”. Tesis Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, tidak diterbitkan. 2008.

D. JURNAL

Azizah, Tsaniyatul. “Kuasa Kiai dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Volume I. No. 2. 2012. Hlm. 397-416.

Darmawijaya. “Islam dan Kekuasaan Orde Baru Membaca kembali Politik De-Islamisasi Soeharto”. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Volume X. No. 1. 2015. Hlm. 63-83.

Mustolehuddin, dan Siti Muawwanah. “Pemikiran Pendidikan K.H. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta”. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Volume I. No. 16. 2018. Hlm. 18-34.

Nambo, Abdulkadir B. dan Muhammad Ruzdiyanto. “Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)”. *Jurnal Mimbar: Sosial dan Pembangunan*. Volume XXI. No. 2. 2005. Hlm. 262-285.

Simorangkir, Jungjungan. “Islam Pasca Orde Baru”. *Jurnal Istinbath*. Vol. XIV. No. 16. 2016. Hlm. 199-216.

Wahid, Muhammad Yeni Rahman. “Kontribusi K.H. Zaenal Munawwir di Pondok Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta”. *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*. Volume II. No. 2. 2018. Hlm. 58-73.

A. INTERNET:

https://id.wikipedia.org/wiki/Alfiyah_Ibnu_Malik

<http://www.almunawwir.com/2015/02/sejarah-berdiri-dan-perkembangan-al.html>

<http://www.golkar.or.id/sejarah-partai-golkar>

<https://www.islamcendekia.com/amp/2016/12/pengertian-mustasyar-syuriyah-rais-aam-awan-tanfidziyah-dalam-nu.html>

<https://merahputih.com/post/read/wawancara-eksklusif-pemburu-pki-di-yogyakarta-burhanuddin-kapak>

<http://www.nu.or.id/post/read/39996/duta-masyarakat>

B. NARASUMBER

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	Nyai Hj. Khusnul Khatimah	68	Pengasuh Pondok Al-Munawwir Komplek Q	Pondok Al-Munawwir Komplek Q, Krpyak.	Istri K.H. Warson Munawwir
2	Nyai Hj. Ida Fatimah	67	Pengasuh Pondok Al-Munawwir Komplek R	Pondok Al-Munawwir Komplek R, Krpyak.	Kakak Ipar dan rekan politik K.H. Warson Munawwir
3	M. Nasikh Ridwan	58	Wiraswasta	Ketonggo, Wonokromo, Pleret, Bantul.	Rekan Politik K.H. Warson Munawwir
4	Drs. H. Iskandar Abdurrahman	80	Ketua Dewan Pembina YDB IPTEK UTY	Umbulharjo, Yogyakarta	Teman sejawat K.H, Warson Munawwir
5	Mushlih Ilyas	62	Wiraswasta	Lemahdadi Kidul, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.	Santri Alumni PP. Al-Munawwir Krpyak
6	Habib Syakur	54	Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga	PP. Al-Imdad, Pajangan, Bantul.	Santri Alumni PP. Al-Munawwir Krpyak
7	Thaha Abdurrahman	83	Ketua MUI DIY	Caturtunggal, Depok, Sleman.	Rekan Politik K.H. Warson Munawwir
8	Dr. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.	59	Hakim Pengadilan Agama Sleman	Krpyak, Bantul	Santri Alumni Pondok Al-Munawwir Krpyak
9	Drs. Ma'shum Amrullah Al-Balani M.M.	61	Konsultan Politik dan Manajemen	Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta.	Rekan Politik K.H. Warson Munawwir

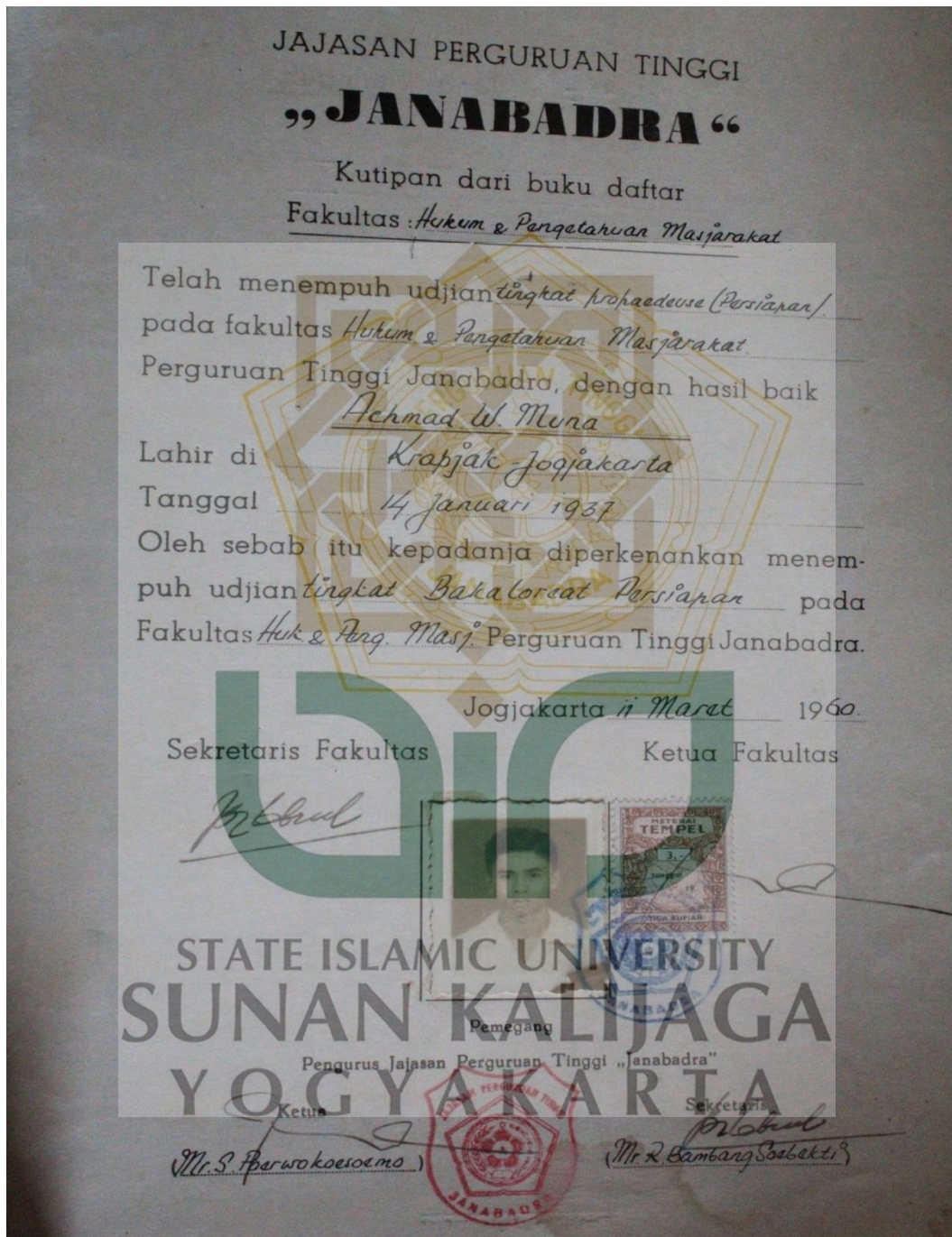
LAMPIRAN

Lampiran I



Arsip Ijazah Madrasah Tsanawiyah K.H. Warson Munawwir
(Doc. Keluarga)

Lampran II



Bukti Kuliah K.H. Warson Munawwir di Janabadra (Doc. Keluarga)

Lampiran III

KOMANDO KOTA KEPOLISIAN
JOGJAKARTA.

KEPUTUSAN KOMANDAN KOMANDO KOTA
KEPOLISIAN JOGJAKARTA.
No. Pol. 6/IR/53/X/Int./65.

Komandan Komando Kota Kepolisian Jogjakarta.

Membarja : Srt. permohonan dari Presidium Gerakan Muda Islam Jogjakarta tgl. 12-10-65 No. 012/B/Ser./PM/65;
Mengingat : 1. Persebutan dari Front Nasional Tjab. Kepan Jogjakarta;
2. Persebutan dari Care Taker Dan Res 72 Prangl. Jogjakarta;
3. Keputusan PEPELRADA NO. KEP-PPDD/OOIC/6/1965;
Tidak bertentangan dengan bilangan permohonan tersebut;
~~Tidak bertentangan dengan ketentuan~~
MEMUTUSKAN

Memberi idjin kepada:

Nama : Sdr. A. WARSUN;
Djabatan : Ketua GEMUIS Jogjakarta;
Alamat : Dj. K.H.A. Dahlan No. 94 Jogjakarta;

Jang dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab atas baiknja pelaksanaan sjarat2 surat idjin ini untuk menjelenggarakan / mengadakan : APPEL AKBAR JANG DIKUTI OLEH: 1. M. U., 2. M. H. M. D. I. J., 3. S. I. S., 4. S. P. K. I., 5. H. M. I., dan K. I. I. I.

Waktu : Tanggal 20 Oktober 1965 Djam 08.00.
Tempat : Alun-alun Utara Jogjakarta;
Hadir : Sejenap Anggota dari Orpel dan Ornis peserta;
Keterangan : TIDAK MENGADAKAN PAWAI.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Dilarang : a. melakukan perbuatan2 jang dapat menimbulkan / merangsang gangguan ketertiban dan keamanan umum, serta hal2 jang bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan timur.
b. melakukan perbuatan2 jang bertentangan dengan politik Negara Republik Indonesia serta pelaksanaannya.
~~c. melakukan perbuatan2 jang bertentangan dengan politik Negara Republik Indonesia serta pelaksanaannya.~~
d. melakukan, memberi kesempatan, membiarkan perbuatan2 jang melanggar ketentuan2 dari peraturan2 / undang2.
e. membawa, menggunakan alat2 peledak dan sendjata apapun djuga didalam pawai / gedung.
- Diharuskan : a. segera diselesaikan pertanggungan djawab segala kuwajiban jang berhubungan dengan hal2 jang tertantum dalam surat idjin ini kepada instansi2 / Kantor2 jang berwenang.
b. menjediakan alat2 pemadam kebakaran dan alat2/tempat2 untuk P.P.P.K. bagi gedung2/tempat jang permanen.
c. Memberi kesempatan dan pelajian jang wajar kepada para pedjabat Pemerintah jang ditunjuk dan para petugas2 untuk mengawasi pelaksanaan sjarat2 tersebut, serta mengindahkan petundjuk2 jang diberikan.

3. DIHARUSKAN : 1. Mentanti Kep. PEPELRADA NO. KEP-PPDD/OOIC/6/1965;
2. Peraturan Lalu-lintas;
3. Mentanti Per. Pres. No. 5 tahun 1963.

4. Hal2 jang belum tertantum dalam ketentuan ini, diadakan ketentuan2 tersendiri.
Apabila salah satu dari ketentuan ini tidak dipenuhi, sewaktu2 surat idjin ini dapat dinjatakan tidak berlaku lagi, dan pemegang idjin harus bertanggung djawab atas segala akibat dari tindakan jang diambil oleh jang berwadajib.

Jogakarta, 19 Oktober 1965.

KOMANDAN:
Kepala Seksi Intelidjen.
(E. M. S. SOEMARTONO)
Atjun Komandan Polisi.

Kepada Jth. :
Sdr. A. WARSUN
Ket. GEMUIS Jogjakarta
Dj. K.H.A. Dahlan No. 94
Jogjakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA

UII 51365

Surat Ijin Pelaksanaan Apel Akbar di Alun-alun Utara dari Komando Komandan Kota Kepolisian Yogyakarta kepada K.H. Warson sebagai Ketua Gemuis (Doc. Keluarga)

Lampiran IV



Kartu Tanda Anggota K.H. Warson Munawwir sebagai DPRD DIY (Doc. Keluarga)



Karya K.H. Warson Munawwir (Koleksi Pribadi)

Lampiran V



Arsip Piagam Penghargaan dari Gubernur DIY untuk K.H. Warson usai menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD DIY (Doc. Keluarga)

Lampiran VI

DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Lampiran : Surat Keputusan No. 036/DPP-02/A.1/IX/1998
Tentang : Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Periode 1998-1999

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 1998-1999**

DEWAN SYURA
Ketua : KH. AHMAD WARSON MUNAWWIR
Wakil Ketua : KH. Drs. M. UMAR SYAMSUL
Sekretaris : MUHAMMAD HASYIM, SH.
Anggota : 1. KH. NAWAWI ABDUL AZIZ
2. Prof. Dr. ASIP F. HADIPRANOTO
3. KH. M. ZAHID RIDWAN
4. H. M. TAMAM NOTOSISWOYO
5. KH. ROSIM AL-FATIH, Lc.
6. KH. Drs. MUHADI ZAENUDDIN, Lc, MAg.
7. Drs. H. TAMYIZ MUHARROM, MA.
8. Drs. M. ZABIDI WARDANI

DEWAN TANFIDZ
Ketua : Drs. H. ALY AS'AD
Wakil Ketua : Drs. IMAM SYAFI'I, MA.
Wakil Ketua : Ny. Hj. FARIDA ZAENAL ABIDIN MUNAWWIR
Wakil Ketua : H. AHMAD KEONG

Sekretaris : Drs. H. NUR AHMAD AFFANDI, MM.
Wakil Sekretaris : FAHMI AKBAR IDRIS, SE.
Wakil Sekretaris : Drs. H. M. NASIKH RIDWAN
Wakil Sekretaris : Hj. ZUNNATUL MAFRUCHAH, SH.

Bendahara : H. PURDI E. CANDRA, MBA.
Wakil Bendahara : AGUS SULISTIONO
Wakil Bendahara : Ir. BUDI PRIYONO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 1998

Dewan Syura, Dewan Tanfidz,

KH. Ma'ruf Amin Ketua
KH. Drs. Dawam Anwar Sekretaris
H. Matori Abdul Djani Ketua Umum
Drs. A. Muhaimin Iskandar Sekretaris Jenderal

**Penetapan K.H. Warson sebagai Ketua Dewan Syura dalam Susunan Dewan
Pengurus Wilayah PKB DIY Periode 1998-1999**

(Doc. DPW PKB DIY)

Lampiran VII

OPP PKB

Lampiran : Surat Keputusan No. 0363/DPP-01/A.IX/II/2001
Tentang : Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2001-2006

SUSUNAN DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2001-2006

DEWAN SYURA

-Ketua : KH. AHMAD WARSON MUNAWIR
Wakil Ketua : KH. NAVAWI ABDUL AZIZ
KH. SALIM

Sekretaris : H. NURJIDDIN AMIN, S.Ag
Wakil Sekretaris : Drs. H.M. NASIKH RIDWAN
Anggota : H. SOFWAN HILMIY
Drs. H.M. UMAR SYAMSUL
KH. MABARUN
DIYAN SUGIONO
Drs. H. M. ROSOEL SHODIEQ
Drs. H. WASIDJAN HARIS, MM

DEWAN TANFIDZ

Ketua : KH. A. MUDJAB MAHALI
Wakil Ketua : Hj. IDA FATIMAH ZAINAL ABIDIN
Drs. H. NADJAMUDDIN, MM
H. PURDI E. CHANDRA, SE, MBA
H. TOTOK SUDARTO, SE
ROHMAT RAHARDJO, S.Pd

Sekretaris : Drs. H. NUR ACHMAD AFFANDI MBA
Wakil Sekretaris : SUKOYO, S.Ag
Drs. HASYIM TURMUCHI
TRIWATI AMBARSARI, SE

Bendahara : Ir. BUDI RIZALDI PRIYONO
Wakil Bendahara : Drs. H. BATARA DAULAY
YUSUF SINGKONO, SH
M. MUHAMMAD ALI

Disiapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Desember 2001

Dewan Syura,
Dewan Tanfidz,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KH. Abdurrahman Wahid
Ketua

H. Z. Arifin Junaidi
Sekretaris

Dr. H. Alwi Shihab
Pjs. Ketua Umum

A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Sekretaris Jenderal

**Penetapan K.H. Warson sebagai Dewan Syura dalam Susunan Dewan
Pengurus Wilayah PKB DIY Periode 2001-2006 (Doc. DPW PKB DIY)**

Lampiran VIII



Foto Keluarga K.H. Warson Munawwir (dokumen keluarga)



K.H. Warson Munawwir dalam Munas Ulama PKB 28-29 Mei 2005 (Doc. DPW PKB DIY)

Lampiran IX



K.H. Warson dalam acara Harlah III PKB (Doc. DPW PKB DIY)



K.H. Warson dalam acara Harlah III PKB (Doc. DPW PKB DIY)

Lampiran X



K.H. A. Musttofa Bisri mengangkat keranda K.H. Warson Munawwir
(dokumentasi PP. Al-Munawwir)



K.H. Zenal menjadi imam shalat jenazah K.H. Warson (Doc. keluarga)

Lampiran XI



Kediaman K.H. Warson tampak dari depan (Doc. Pribadi)



Kediaman K.H. Warson tampak dari samping (Doc. Pribadi)

Lampiran XII



Bangunan Pondok Al-Munawwir Komplek Q (Doc. Pribadi)



Bangunan Pondok Al-Munawwir Komplek Q (Doc. Pribadi)

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Mimin Ayu Trisnawati
Tempat/ tanggal lahir : Pati, 08 Mei 1997
Nama Ayah : Sutrisno
Nama Ibu : Karminah
Asal Sekolah : MA. Raudlatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati
Alamat Kos : Jln. Raden Ronggo KG II Prenggan, Kotagede,
Yogyakarta
Alamat Rumah : Bajomulyo, Juwana, Pati
Email : Ayutriznamimin@gmail.com
No. Hp : 082242896295

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK tahun lulus 2003
 - b. SD/MI tahun lulus 2009
 - c. SMP/MTs tahun lulus 2012
 - d. SMA/MA tahun lulus 2015
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Ulum Pati 2010-2015
 - b. Pondok Pesantren Wahid Hayim Yogyakarta 2015-2016
 - c. Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri

Yogyakarta, 6 November 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Mimin Ayu Trisnawati